



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SI GEDE NGURAH SUTAPA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 674915

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1950 m2/1630 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 18.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 16.500.000
5. MOBIL, HONDA HONDA HRV-VRU 1.5 E Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.447.800.000

III. HUTANG Rp. 251.389.705

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.196.410.295



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.